JURNAL BAKTI SOSIAL Vol. 2 No. 1. 2023
BAKTI SOSIAL
Email: arsypersadaquality@gmail.com
https://jurnal.asrypersadaquality.com/index.php/baktisosial

PENDIDIKAN POLITIK DALAM MENUMBUHKAN MINAT PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN SERENTAK 2024 MENUJU INDONESIA MAJU

Asaluddin Nasution
nasutionasaluddin@gmail.com

Abstrak

Sebagai warga negara di negara demokrasi dituntut untuk menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Sebab, melalui pemilu, warga negara memberikan hak pilihnya kepada orang-orang yang diyakininya mampu membawa aspirasinya ke dalam proses pengambilan kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dimana metode ini memanfaatkan data kualitatif dan dideskripsikan secara deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, dan media online. Teknik pengumpulan data dan analisis data dalam penelitian ini adalah observasi, dan media online yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menggali, dan menghimpun secara valid, lengkap, dan relevan informasi yang berkaitan dengan topik masalah yang menjadi objek penelitian. Hasil penulisan ini memberikan gambaran bahwa dengan pendidikan politik, sangat bermanfaat sebagai strategi untuk menumbuhkan nilai nilai demokrasi guna menggunakan hak pilihnya sebaik mungkin. Sedangkan Sosialisasi politik dapat dilakukan mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat. sekolah, dan media masa.

Kata Kunci: Pemilih Pemula, Pemilihan Umum, Pendidikan Politik.

Abstract

As citizens in a democratic country, they are required to use their voting rights as well as possible. Because, through elections, citizens give their right to vote to people they believe are capable of bringing their aspirations into the policy-making process.This study uses a descriptive qualitative approach, where this method utilizes qualitative data and is described descriptively. Sources of data in this study were obtained through observation and online media. Data collection and data analysis techniques in this study were observation and online media used by researchers to collect, explore, and compile valid, complete, and relevant information relating to the topic of the problem that is the object of research. The results of this writing illustrate that with educational politics, it is very useful as a strategy to foster democratic values in order to use their right to vote as well as possible. While political socialization can be done starting from the family environment, society. schools and mass media**.**

Keywords: Beginner restorers, General Elections, Political Education

PENDAHULUAN

Menurunnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman terhadap berbagai bentuk isu politik dan kejenuhan masyarakat proses demokratisasi yang belum sepenuhnya berdampak signifikan terhadap kualitas hidup warga negaranya. Pada akhirnya, akumulasi kekecewaan terhadap realitas politik yang dirasakan harus terjadi paling tidak mendorong terbentuknya sikap apatis politik.(Rahman, 2018) Jadi, pendidikan politik atau sering disebut dengan “pendidikan politik” adalah upaya pelibatan warga negara untuk menciptakan budaya yang tinggi partisipasi.

Demokrasi sangat membutuhkan partisipasi warga negara dalam proses pendewasaan demokratisasi. Misalnya, pada pemilihan umum 2004, tingkat partisipasi pemilih angkanya hanya 84,1%, turun dari pemilu 1999 yang angka partisipasinya mencapai 92,6%. Pada Di sisi lain, tingkat partisipasi menurun pada pemilihan umum 2009 menjadi 70,9%. disertai dengan peningkatan jumlah orang kulit putih atau warga negara yang tidak menggunakan haknya untuk memilih sebesar 29,1%. Begitu juga pada Pemilu 2014 yang hanya menyentuh tingkat partisipasi pemilih 70 persen.(Irawan, 2020)

Melalui pendidikan politik, warga diberikan informasi secara cepat dan tepat, sehingga terjadi proses transfer nilai dan norma padahal tidak bergabung dengan partai politik terkait. Jadi, tujuan dan fungsi politik pendidikan adalah membangun kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam fungsi sosial dan politik; membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan tinggi kesadaran politik; meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan, tanggung jawab, dan etika tentang politik; dan mendorong peningkatan tingkat partisipasi politik aktif masyarakat.

Padahal jika pada akhirnya tingkat partisipasi masyarakat masih tercatat atau relatif rendah, tidak luput dari kemungkinan batalnya hasil pemilihan umum (pemilu), namun hal ini dapat menunjukkan kesadaran politik yang ada dalam masyarakat dalam memposisikan dirinya sebagai sentral unsur daerah itu sendiri. Oleh karena itu latar belakang rencana penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pendidikan politik dapat meningkat partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum 2024.

Di sisi lain, partisipasi politik dari masyarakat digunakan sebagai salah satu landasan atas dasar wujud perwujudan negara demokrasi, di mana rakyat terlibat langsung dalam proses pemilihan umum (pemilu). Dalam hal ini, warga memainkan sangat penting peranannya dalam menyeleksi berbagai bentuk

pejabat negara yang nantinya akan mengelola pemerintahan dan tindakan yang akan mereka ambil di masa depan. Karena, demokrasi digunakan sebagai salah satu landasan yang sangat penting dalam kaitannya dengan sistem politik yang mampu memberikan ruang bagi keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara.(Bashori, 2018)

Oleh karena itu, ciri mendasar dari keberadaan negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum ini. Hal ini karena pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pesta rakyat demokrasi untuk mewujudkan kemauan politik rakyat dalam memilih calon pemimpin yang cocok untuk menduduki jabatan berdasarkan amanat yang diberikan sebelumnya. Dalam pemilihan umum (pemilu), untuk Misalnya, partisipasi politik sangat mempengaruhi legitimasi masyarakat terhadap calon pasangan yang telah terpilih.

Politik adalah salah satu langkah yang dilakukan dalam upaya meningkatkan pengetahuan politik bagi masyarakat, sehingga mereka bisaberpartisipasi secara aktif dan optimal dalam sistem politiknya sesuai dengan pengertian kerakyatan kedaulatan atau demokrasi rakyat untuk menjalankan tugasnyadan berfungsi sebagai partisipasi itu sendiri. Zainal Fikri,(2017: 9) Pelaksanaanpartisipasi politik sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Jaminan dan Perlindungan Negara atas Hak Sipil dan Politik warga negara seperti, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berserikat, hak untuk memilih dan menjadi dipilih, hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan, dan hak atas keadilan yang sama. Jadi, salah satu faktor itusangat mendukung dalam pemilihan umum (pemilu) adalah tingkat partisipasi dan partisipasi masyarakat yang besarjumlah partisipasi akan menunjukkan kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya umumpemilihan *(election)* itu sendiri. Sebab, dengan adanya partisipasi warga merupakan nafas dalam sebuah negara demokrasi Riyanti,(2022: 8)

Dengan demikian, upaya peningkatan partisipasi, pemahaman, dan kesadaran dalam berpolitik dapat dilakukan dengan berbagai pihak, baik dari pemilihan umum penyelenggara (pemilu), peserta politik, dan akademisi, khususnya dari perguruan tinggi di melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Tri Dharma Perguruan Tinggi). Di sisi lain, salah satu cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan partisipasi, pemahaman, dan kesadaran dalam politik adalah melalui pendidikan pemilih yang merupakan isu penting untuk menumbuhkan politik kesadaran masyarakat itu sendiri. Ditambah lagi, pemilih pemula adalah seseorang yang berusia sekitar 17-20 tahun atau yang baru pertama kali ikut ikut serta dalam pemilihan umum. Hal ini karena pemilih pemula sendiri adalah warga negara berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (pemilihan nasional atau pemilihan kepala daerah).(Pratama et al., 2023)

Dengan demikian, istilah pemilih muda muncul dalam pemilihan umum (pilkada) sebagai salah satu langkah yang tepat bagi generasi muda bagi pemilih yang memiliki sifat dan karakteristik berbeda, latar belakang, pengalaman, dan tantangan pemilih dari generasi sebelumnya. Sebab, suara para pemilih pemula ini memang perlu diarahkan sebaik mungkin, gitu agar mereka tidak salah dalam menyalurkan aspirasinya, sehingga pemilihan umum (pemilu) harus berjalan

sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi tersebut. Oleh karena itu, tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi pertama kali pemilih pada pemilihan umum tahun 2024.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan deskriptif kualitatif, dimana metode ini menggunakan data kualitatif dan dideskripsikan secara deskriptif (Suhami Arikunto 2015) Sumber data dalam penelitian ini diperoleh observasi, dan media online. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, dan media online yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan, menggali, dan mengumpulkan informasi yang valid, lengkap, dan relevan terkait dengan topik masalah yang menjadi objek penelitian. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis melalui pendekatan menyimpulkan hasil yang telah diperoleh dan menafsirkan hasil yang diperoleh (Sugiono 2018)

HASIL PENELITIAN

Pemilu Serentak: Wadah Mewujudkan Nilai Demokrasi

Sebagai warga negara di negara demokrasi dituntut untuk menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Sebab, melalui pemilu, warga negara memberikan hak pilihnya kepada orang-orang yang diyakininya mampu membawa aspirasinya ke dalam proses pengambilan kebijakan. Dengan demikian, pemilihan umum adalah sarana bagi warga untuk menilai visi, misi, dan program yang sesuai dengan caleg dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemilihan umum juga merupakan saluran bagi rakyat aspirasi untuk mengevaluasi kinerja wakilnya pada pemilu sebelumnya. Idealnya Pada tingkat ini, pemilu harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh setiap warga negara untuk memilih partai atau calon sesuai keinginan mereka.(Nugroho & Sukmariningsih, 2020)

Namun kenyataannya, jebakan politik transaksional justru mengakar dan membuat orang terjebak di dalamnya pusaran pragmatisme politik. Jika kondisi ini dibiarkan terus menerus, kemungkinan besar akan terjadi merosotnya nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Dalam negara demokrasi, pemilu memiliki beberapa fungsi, yaitu sarana pemberian dan penetapan legitimasi kekuasaan dan pemerintahan; arti dari membangun representasi politik bagi setiap warga negara; pembaruan sirkulasi elit pemegang kekuasaan; sarana mendidik masyarakat untuk mewaspadai dunia politik; dan sarana partisipasi warga negara.(Sadzali, 2022) Sebab, demokrasi yang disepakati di Indonesia adalah presidensial demokrasi, di mana Presiden menjadi pemimpin negara dan pemerintahan. Di sisi lain, keberadaan badan legislatif yang menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan jalannya pemerintahan (Riskiyono, 2019). Dengan demikian, proses pemilihan umum di Indonesia bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan nilai-nilai filosofis yang adil. Prinsip ini merupakan tujuan dari pengorganisasian secara umum pemilu, padahal setiap tahapan pemilu selalu diwarnai dengan tindakan tidak terpuji, baik yang dilakukan oleh warga negara maupun oleh simpatisan partai atau calon yang sedang bertarung.

Hal tersebut bisa terlihat dari Indonesia yang tercatat telah menyelenggarakan 12 pemilihan umum, sehingga hingga saat ini hanya pemilihan umum pertama tahun 1955 yang diyakini sebagai pemilihan umum yang benar-benar bersih dan adil. Tingkat partisipasi warga dalam pemilihan umum pertama

ini sangat tinggi dan golongan putih (golput) tingkat di bawah sepuluh persen. Seiring berjalannya waktu, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum semakin tinggi menurun.(Rumkel et al., 2023)

Ketidak percayaan warga terhadap partai politik dan kandidat yang bersaing dianggap berkontribusi faktor tingginya jumlah golput. Maka, era reformasi yang dielu-elukan sebagai salah satu Momentum demokratisasi di Indonesia tidak sepenuhnya mampu mengembalikan tingkat partisipasi warga di Indonesia pemilihan umum menjadi 90 persen.(Riskiyono, 2019) Apalagi, dalam dua pemilihan umum terakhir pada 2014 dan 2019, politik perpecahan semakin terasa. Kondisi ini diperparah dengan hadirnya teknologi digital yang berbanding terbalik dengan tingkat literasi digital warga. Di masa lalu, "kampanye negatif dan kampanye hitam" merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh para kandidat berjuang di arena politik. Saat ini, kebingungan dan informasi palsu adalah hal baru masalah keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

Aktivisme digital memiliki pengaruh besar terhadap citra demokrasi suatu negara. Di sisi lain, media digital telah menjadi ruang musyawarah bagi masyarakat untuk menambah pengetahuannya dan kesadaran politik. Namun, di sisi lain, rendahnya kontrol terhadap kesadaran saat menggunakan digital media membuat warga terjebak dalam limpahan informasi, apalagi masih belum diketahui caranya memilah informasi yang benar dari informasi yang salah. Plus, perang di media sosial yang umum terjadi di Indonesia hanya untuk mempertahankan argumentasi yang belum tentu benar (Sadzali, 2022). Media sosial yang memungkinkan orang membuat akun anonim dalam jumlah besar adalah faktor yang menentukan besarnya kebingungan informasi. Oleh karena itu, keberadaan ini pemilihan umum merupakan indikasi kuat dalam mewujudkan segala bentuk nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

Sosialisasi Pendidikan Politik

Sosialisasi politik dapat dilakukan mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat. sekolah, dan media masa. Masing- masing baik sendiri-sendiri atau bersamasama memiliki peran yang tidak kecil dalam membetuk sikap dan perilaku politik warga Negara. Lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan Pendidikan Masyarakat

   J.P. Gillin (1991) mengartikan masyarakat sebagai sekelompok manusia yang tersebar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan untuk hidup bersama. Masyarakat terdiri atas kesatuan-kesatuan yang paling kecil. Pada prinsipnya suatu masyarakat terwujud apabila diantara kelompok individu-individu tersebut telah lama melakukan kerja sama serta hidup bersama secara menetap. Sistem pewarisan budaya lewat lingkungan masyarakat berlangsung dalam berbagai pranata sosial (Riskiyono, 2019). Di anataranya pemilahan hak milik, perkawinan, religi, sistem hukum, sistem kekerabatan, dan sistem edukasi. Sebagai suatu komunitas yang lebih luas, masyarakat memiliki struktur. Pewarisan budaya menjadi tugas bersama bagi seluruh anggota masyarakat di lingkungannya. Bila seorang anak melakukan hubungan pertemanan maka hubungan atau interaksi sosial itu menunjukkan hubungan yang lebih luas. Mereka akan menerima berbagai pembelajaran nilai dan norma,

memperlakukan orang lain, menghormati orang yang lebih tua, dan sebagainya. Mendapatkan bimbingan, dan nilai-nilai lain yang berkembang pada masyarakatnya. Pada saat anak melakukan kekeliruan, maka anggota masyarakat lainnya akan memberikan nasihat atau koreksi terhadap perilakunya yang tidak sesuai tersebut. Demikian selanjutnya seorang anak diberi pelajaran dan bimbingan oleh anggota masyarakat lainnya.

2. Lingkungan Sekolah

   Sekolah adalah institusi yang diciptakan oleh masyarakat yang berfungsi untuk melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran tidak hanya menyampaikan pengetahuan saja yang berupa latihan untuk kecerdasan, melainkan untuk menghaluskan moral dan menjadikan akhlak yang baik. Sekolah dalam masyarakat dikategorikan sebagai pendidikan formal. Pada dasarnya lembaga sekolah berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di bidang pembelajaran. Kebutuhan masyarakat tentang pembelajaran semakin hari semakin banyak. Oleh karena itu, sekolah pada dasarnya menyiapkan dan membekali peserta didik untuk kehidupan di masa yang akan datang.(Rumkel et al., 2023).

   Pendidikan di sekolah dalam kerangka pewarisan budaya jelas sekali arahnya. Para pendidik yang bertugas sebagai guru melakukan penyampaian pengetahuan dan interaksi moral itu berdasarkan rancangan atau program yang disesuaikan dengan sistem pengetahuan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Misalnya dalam mata pelajaran agama yang senantiasa harus diajarkan di berbagai tingkatan dan jenjang pendidikan di sekolah. Hal ini merupakan cermin dari masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

3. Lingkungan Pendidikan Media Massa

   Media massa adalah bagian dalam masyarakat yang bertugas menyebarluaskan berita, opini, pengetahuan, dan sebagainya. Sifat media massa adalah mencari dan mengolah bahan pemberitahuan yang aktual, menarik perhatian, dan menyangkut kepentingan bersama. Berdasarkan sifatnya, media massa berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap segala bentuk penyimpangan dari nilai, norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Dengan pemberitaan yang baik dan benar masyarakat menjadi tahu terhadap setiap peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar (Natalia, 2015)

   Salah satu fungsi media massa adalah fungsi pendidikan bagi masyarakat. Banyaknya informasi yang diberitakan, baik berupa pendapat-pendapat, masalah sosial budaya secara langsung maupun tidak dapat memperluas wawasan para pembaca dan pemirsanya. Melalui media massa terjalin hubungan atau kontak sosial secara tidak langsung antar anggota masyarakat. Keseluruhan itu menunjukkan besarnya peran media massa dalam proses transformasi budaya bagi seluruh anggota masyarakat.

4. Lingkungan Keluarga

   Lingkungan keluarga adalah unit sosial terkecil, yang memiliki

peran penting dalam pendidikan anak. Proses indetifikasi dalam keluarga menjadikan seorang anak dapat mengenal keseluruhan anggota keluarganya, baik saudara terdekat maupun saudara jauh. Seorang ayah yang berperan sebagai kepala keluarga dikenalnya melalui tindakan-tindakannya (Triono, 2017). Demikian pun kegiatan ayah dalam pekerjaan sehari-hari memungkinkan terjadinya identifikasi (bentuk peniruan) oleh anak-anaknya. Upaya peniruan yang pada mulanya dilakukan sambil lalu ini, secara perlahan akan menjadi bagian dalam transmisi budaya, para orang tua berfungsi sebagai narasumber utama.

Secara tersirat budaya belajar melalui peniruan, baik secara individual maupun kelompok memungkinkan terjadinya pemahaman utuh antar generasi (orang tua versus anak). Lingkungan keluarga menjadi salah satu fokus pendidikan, terutama mengenai sistem pewarisan kebudayaan. Di dalam keluarga itulah suatu generasi dilahirkan dan dibesarkan. Mereka mendapat pelajaran pertama kali, apalagi bagi masyarakat yang belum mengenal dan menciptakan pendidikan formal. Dalam lingkungan keluarga terdapat tiga fungsi utama keluarga yaitu: (1) fungsi seksual; (2) fungsi ekonomi; dan (3) fungsi edukasi.

Fungsi edukasi berkaitan dengan pewarisan budaya. Keluarga bukan hanya sebagai tempat melahirkan anak tetapi sekaligus sebagai tempat membesarkannya. Anak dalam lingkungan keluarga belajar berbahasa, mengumpulkan berbagai pengertian serta belajar menggunakan nilai yang berlaku dalam kebudayaannya. Dengan demikian, keluarga berfungsi meneruskan nilai budaya yang dimilikinya. Suasana edukasi berlangsung penuh kasih sayang, keakraban dan penuh tanggung jawab. Dengan kata lain kegiatan edukasi dilakukan secara terus menerus dengan berbagai cara.

KESIMPULAN

Sebagai warga negara di negara demokrasi dituntut untuk menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Sebab, melalui pemilu, warga negara memberikan hak pilihnya kepada orang-orang yang diyakininya mampu membawa aspirasinya ke dalam proses pengambilan kebijakan. Sosialisasi politik dapat dilakukan mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat. sekolah, dan media masa. Masing- masing baik sendiri-sendiri atau bersamasama memiliki peran yang tidak kecil dalam membetuk sikap dan perilaku politik warga Negara. Dalam lingkungan keluarga terdapat tiga fungsi utama keluarga yaitu: (1) fungsi seksual; (2) fungsi ekonomi; dan (3) fungsi edukasi. Pada masyarakat sebagai sekelompok manusia yang tersebar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan untuk hidup bersama. Masyarakat terdiri atas kesatuan-kesatuan yang paling kecil. Pendidikan di sekolah dalam kerangka pewarisan budaya jelas sekali arahnya. Para pendidik yang bertugas sebagai guru melakukan penyampaian pengetahuan dan interaksi moral itu berdasarkan rancangan atau program yang disesuaikan dengan sistem pengetahuan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Salah satu fungsi media massa adalah fungsi pendidikan bagi masyarakat. Banyaknya informasi yang diberitakan, baik berupa pendapat-pendapat, masalah sosial budaya secara langsung maupun tidak dapat memperluas wawasan para

pembaca dan pemirsanya. Melalui media massa terjalin hubungan atau kontak sosial secara tidak langsung antar anggota masyarakat. Keseluruhan itu menunjukkan besarnya peran media massa dalam proses transformasi budaya bagi seluruh anggota masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adhi Pratama, Finsa, and Irma Irayanti. "JPK : Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan (Print) Kajian Filosofis: Islam Dan Negara Pancasila." *Tahun* 7, no. 1 (2022): 37–45. http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/index.

Ahadiya, Ikrima Amira. "Implementasi Pemikiran Politik Al Maududi Dalam Dinamika Politik Kontemporer." *Politea : Jurnal Politik Islam* 5, no. 1 (2022): 17–36.

Al-Farisi, L.S. "Sosialisme Islam Di Indonesia: Melacak Akar Pemikiran Dan Aktualisasi Gerakan Politik Islam Hadji Oemar Said Tjokroaminoto." *Jurnal Aspirasi* 12, no. 1 (2022): 39–62.

Amrin, Amrin. "Relasi Agama Dan Negara (Respon Terhadap Politik Hukum Islam Di Indonesia)." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2022): 173.

Bashori, K. (2018). Pendidikan Politik di Era Disrupsi. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, *2*(2), 287–310. https://doi.org/10.32533/02207.2018

Irawan, A. D. (2020). Pendidikan Pemilih Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Serentak 2019. *Jurnal Hukum Replik*, *7*(1), 55. https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2448

Natalia, A. (2015). beliau adalah staf pengajar di Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung. □. *Jurnal TAPIs*, *11*(1), 47–68.

Nugroho, D. A., & Sukmariningsih, R. M. (2020). Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal JURISTIC*, *1*(01), 22. https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1449

Pratama, R. A., Adiputra, Y. S., Kustiawan, K., Chairin, R. O. P., & Rahmi, K. (2023). Sosialisasi Penerapan Nilai-Nilai Demokrasi Era Digital Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. *Takzim : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *3*(1), 63–69. https://doi.org/10.31629/takzimjpm.v3i1.5340

Rahman, A. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, *10*(1), 44. https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8385

Fanani, Zahrodin. "Islam Dan Perubahan Politik (Studi Pergeseran Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Politik Islam)" 3 (2022): 135–150.

Farina, Aisya. "Refleksi Sejarah Perkembangan Kebijakan Publik Dan Ekonomi Politik Islam Pada Masa Khulafa' Al-Rasyidin." *ILTIZAMAT: Journal of economic sharia law and business studies* 1, no. 2 (2022): 91–103.

Fikri, Zainal. "Politik Islam Antara Dakwah Dan Orientasi Kekuasaan." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 13, no. 26 (2017): 55–60.

Hasani, Adib. "Kontradiksi Dalam Konsep Politik Islam Eksklusif Sayyid Quthb."

Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman 11, no. 1 (2016): 1–30.

Lubis, Hafnita Sari Dewi, and Muhammad Ihsan Syahaf Nasution. "Pengaruh Partai Politik Terhadap Konstruksi Pemikiran M. Natsir." *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial* 6, no. 1 (2022): 45–52.

Populi, V O X. "Institusionalisasi Visi Politik Profetik Dalam Arus Revolusi Industri 4 . 0 Pada Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar" 5 (2022): 108–124.

Pratama, Fikri surya. "Perkembangan Dan Implikasi Implementasi Kebijakan Politik Islam Dalam Kehidupan Pluralisme Malaysia." *Majalah Ilmiah Tabuah: Ta'limat, Budaya, Agama dan Humaniora* 26, no. 2 (2022): 56–66.

Rico Khashogi, Luqman. "Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda." *POLITEA: Jurnal Politik Islam* 5, no. 1 (2022): 64–82.

Riyani, I, U Utari, W Cahyanti, and A N Aeni. "Pengembangan Flipbook of Khulafaurrasyidin Leadership Sebagai Media Untuk Memahami Politik Islam Bagi Anak Sekolah Dasar." *Fashluna* (2022): 1–30. http://ejournal.stitbima.ac.id/index.php/fashluna/article/view/356%0Ahttp://ejournal.stitbima.ac.id/index.php/fashluna/article/download/356/264.

Ryzka Dwi Kurnia. "Pemikiran Fazlur Rahman Mengenai Politik Islam." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 8, no. 2 (2021): 25–41.

Santoso, Widi, Akhyar Hanif, and Ulya Fitri. "Marketing Politik Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 (Studi Pemenangan Eka-Richi Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih 2020 – 2024 Kabuaten Tanah Datar) Political Marketing in Simultaneous Local Elections in 2020 (Study of Eka- Richi Elected Regent and Deput." *Jurnal Politik Islam* 1, no. 1 (2020): 38–46.

Sarkawi, Sarkawi, and Fadli Ahmad. "Memilih Pemimpin Dalam Islam." *Idarotuna* 3, no. 3 (2022): 198.

Sempurna, Ahmad, M. Taufiq Hidayah Tanjung, and Raden Deni Admiral. "Komunikasi Politik Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Di Tengah Pandemi Covid-19 Pada Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 9, no. 2 (2022): 113–124.

Siswanto, Eko, and Athoillah Islamy. "Fikih Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Bernegara Di Indonesia." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 7, no. 2 (2022): 198–217.

Utami, Deanita Elsa, Indah Sari, Nihlatul Hayatti, Reggita Indriani, Sri Rahayu, and Hisny Fajrussalam. "Peran Etika Politik Islam Dalam Strategi Lembaga Dakwah Kampus Untuk Meningkatkan Religiusitas Mahasiswa." *JPG: Jurnal Pendidikan Guru* 3, no. 3 (2022): 223.

Riskiyono, J. (2019). Kedaulatan Partisipasi Pemilih dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Serentak 2019 [Voters' Agency in the Supervision of Regional Elections and the 2019 Simultaneous General

Elections]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, *10*(2), 145–165. https://doi.org/10.22212/jp.v10i2.1450

Rumkel, N., Hukum, M. I., Pascasarjana, P., Khairun, U., Hukum, I., Hukum, F., Khairun, U., Artikel, I., & Pemula, P. (2023). *PEMILIHAN UMUM DI KALANGAN MAHASISWA*. *1*(2), 48–57.

Sadzali, A. (2022). Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, *2*(2), 193–218. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.14948

Triono, T. (2017). Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, *5*(2). https://doi.org/10.34010/agregasi.v5i2.447